

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Etnis Tionghoa¹ di Indonesia merupakan suatu kelompok minoritas. Untuk memudahkan identifikasi etnis Tionghoa maka digunakanlah istilah *totok* dan *peranakan* (Ibrahim, 2013). Para ahli berbeda pendapat mengenai dua istilah tersebut. Menurut Onghokham untuk mendefinisikan *totok* dan *peranakan* dapat dilihat dari segi kelahirannya. *Totok* adalah pendatang baru dari negara Tiongkok sekaligus kelahiran Tiongkok. Sedangkan *Peranakan* merujuk pada orang-orang Tionghoa yang lahir di luar negara Tiongkok dari seorang *totok* (Onghokham, 2008). Lebih lanjut Onghokham menyebut istilah *totok* dengan *singkeh* atau *singkek* (Onghokham, 2008). Pendapat selanjutnya datang dari Suryadinata yang berpendapat bahwa orang Tionghoa yang lahir di Indonesia tidak serta merta disebut *peranakan*, hanya mereka yang menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari yang dapat disebut *peranakan*.

¹ Dalam penulisan ini digunakan istilah Tionghoa untuk menyebut etnis ini. Menurut Leo Suryadinata istilah "Cina" untuk menyebut negeri Tiongkok dan bangsanya sudah lama digunakan, pada awalnya istilah ini tidak mengandung unsur penghinaan. Namun menjelang abad ke-20, seiring bangkitnya Nasionalisme Cina, istilah ini mulai dipandang memiliki makna yang kurang baik oleh orang Tionghoa itu sendiri. Istilah Tionghoa dan Tiongkok mulai lazim digunakan oleh etnis Tionghoa dan diikuti oleh kelompok lain sampai lahirnya Orde Baru. Pada seminar Angkatan Darat pada Agustus 1966 diputuskan mengganti istilah Tiongkok dan Tionghoa menjadi Cina untuk menunjukkan amarah rakyat Indonesia terhadap RRC (yang mendukung PKI) dan warga negaranya. Setelah tumbang rezim Orde Baru, banyak kalangan yang kembali menggunakan istilah Tiongkok dan Tionghoa. Namun, orang Tionghoa sendiri memiliki perbedaan. Kelompok pertama tetap menggunakan istilah "Cina" alasannya karena sudah terbiasa dan mereka merasa tidak ada unsur penghinaan. Ada juga yang berpendapat bahwa masalah istilah tidak begitu penting. Menurut Arief Budiman apapun istilahnya baik itu Cina ataupun Tionghoa jika itu ditunjukkan untuk menghina sama saja menyakitkan. Lihat Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2010, hlm. 193-196.

Seorang Tionghoa meskipun ia lahir di Indonesia namun berbahasa dan berorientasi ke negara Tiongkok maka ia masih disebut *totok* (Suryadinata, 1984). Berangkat dari pandangannya tersebut, Suryadinata mencoba untuk menjelaskan bahwasanya istilah *totok* dan *peranakan* bukan hanya mengacu pada tempat kelahiran, melainkan sejauh mana mereka berbaur dengan kebudayaan lokal. Terlepas dari perbedaan pandangan kedua istilah tersebut, etnis minoritas ini selalu mengiringi dinamika sejarah Indonesia dan hadir dalam setiap permasalahan di negeri ini, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Kedatangan orang-orang Tionghoa ke Nusantara sudah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu. Hampir semua para pendatang Tionghoa tersebut bukan berasal dari pusat Han di Tiongkok, melainkan dari pinggiran seperti Fujian dan Guangdong (Ali Muhamad, 2007). Salah satu rujukan utama yang menjelaskan kapan pastinya orang-orang Tionghoa pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara adalah catatan perjalanan seorang biksu Buddha yang bernama Faxian. Selama perjalanannya menuju India dari tahun 400 sampai 414 M, sang biksu menyempatkan diri singgah di Pulau Jawa (Afif, 2012). Menurut pengakuannya, ia belum banyak menemukan orang-orang Tionghoa di Pulau Tersebut. Dalam catatannya yang berbunyi “di negeri ini banyak terdapat para *heredic* (penyembah berhala) dan *brahman* (penganut Hindu), tetapi sedikit sekali penganut Buddha” (Groenveldt, 2009) tidak disebutkan secara jelas tentang keberadaan orang Tionghoa di pulau Jawa, namun keterangan penganut Buddha pada

pernyataan tersebut merujuk pada orang-orang Tionghoa, mengingat pada saat itu negeri Tiongkok merupakan pusat agama Buddha di dunia.

Tujuan kedatangan orang Tionghoa ke Nusantara adalah untuk berdagang barang-barang seperti teh, porselen, sutera dan sebagainya. Selain itu ada juga yang menjadi petani, buruh, dan ahli pertukangan. Secara umum kedatangan mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kemudian terjadi interaksi antara orang Tionghoa dengan penduduk pribumi, orang Tionghoa hidup membaaur dengan membawa adat istiadat maupun tradisi yang kemudian melebur dengan budaya setempat. Perlu diketahui juga, orang Tionghoa berperan dalam proses Islamisasi yang terjadi di Indonesia. Jauh sebelum kedatangan Belanda di Nusantara sudah ada kelompok masyarakat Tionghoa Muslim yang menetap di Nusantara, terutama di pulau Jawa. Komunitas Tionghoa Muslim awal yang mendiami pesisir utara pulau Jawa umumnya para pedagang dan imigran yang datang karena kondisi sosial-politik di daratan Tiongkok yang kurang kondusif. Ma Huan, seorang Tionghoa Muslim, yang ikut dalam pelayaran Laksamana Cheng Ho pada abad ke-15, di dalam bukunya, *Yin-yai Sheng-lan* menyatakan pada masa itu sudah ada kelompok Tionghoa Muslim terutama di pesisir utara pulau Jawa. Kebanyakan dari mereka berasal dari daerah-daerah seperti Zhangzhou, Quanzhou, dan Guangdong (Afif, 2010), hal ini dapat dipahami mengingat daerah-daerah di selatan Tiongkok tersebut merupakan pusat umat Islam sebagai konsekuensi dari hubungan antara Tiongkok dengan Arab (Sumanto Al Qurtuby, 2003).

Seiring berjalannya waktu interaksi mereka semakin intensif dengan penduduk pribumi yang akhirnya melahirkan proses asimilasi terutama lewat jalur perkawinan. Kondisi ini memungkinkan orang Tionghoa Muslim tersebut melakukan kegiatan dakwah kepada penduduk pribumi.

Hubungan yang harmonis antara orang Tionghoa dengan pribumi terus berlangsung setidaknya sampai kedatangan Belanda ke Nusantara. Belanda memberlakukan sistem pembagian masyarakat berdasarkan ras, di mana golongan Eropa menempati posisi teratas disusul golongan Timur asing (Tiongkok, Arab, dan India) kemudian pribumi sebagai golongan terendah dalam struktur masyarakat kolonial. Ketika kongsi dagang Belanda, *Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)* dibentuk, VOC mulai menjalin kerja sama dengan orang Tionghoa, mereka mengangkatnya sebagai partner dagang. Selain itu orang Tionghoa juga dipercaya sebagai penarik pajak yang membuka kemungkinan pemerasan terhadap masyarakat pribumi. Kebijakan-kebijakan Belanda tersebut membuat orang Tionghoa di cap sebagai kaki tangan penjajah. Jurang pemisah antara orang Tionghoa dengan pribumi semakin lebar terutama sejak meletusnya peristiwa *Chinezenmoord* (pembantaian orang Tionghoa) di Batavia tahun 1740. Setelah kejadian tersebut, Belanda membentuk *ghetto-ghetto* untuk orang Tionghoa, sistem ini disebut Pecinan, menempatkan orang Tionghoa di daerah tertentu yang terpisah dari masyarakat pribumi dan menginstruksikan mereka hanya untuk berdagang. Saat ini kawasan tersebut dikenal dengan nama Glodok.

Kebijakan *divide at impera* Belanda berhasil merusak hubungan orang Tionghoa dan pribumi. Karena statusnya yang lebih tinggi dari pribumi, kebanyakan orang Tionghoa cenderung mengadopsi nilai-nilai dan identitas yang melekat pada orang Eropa, seperti mengikuti pendidikan ala Eropa, menggunakan busana khas orang Eropa, dan memeluk agama Kristen atau Katolik sebagaimana orang Eropa pada umumnya (Afif, 2010). Jarang ditemukan orang Tionghoa yang mengikuti nilai-nilai dan identitas sosial yang dimiliki masyarakat pribumi, seperti memeluk agama Islam, bagi orang Tionghoa menjadi seorang Muslim sama saja dengan menurunkan status sosial mereka. Belanda sendiri menyebut orang Tionghoa Muslim dengan istilah yang kurang mengenakkan yaitu “Cina Cukuran”, disebut demikian karena pada abad ke-18 bagi orang Tionghoa yang memutuskan memeluk Islam harus memotong kuncirnya (Onghokham, 2008). Sampai tahun 1830 orang Tionghoa Muslim masih memiliki seorang “Kapitan” atau seorang Kepala bagi mereka sendiri. Melihat hal ini dengan tepat Onghokham menyatakan bahwa orang Tionghoa Muslim masih dianggap asing oleh Belanda, dalam artian berbeda dengan Muslim pribumi (Onghokham, 2008) Maka tidak mengherankan jika masa kolonial ini merupakan periode tersuram dalam sejarah keberadaan komunitas Tionghoa Muslim di Indonesia.

Meskipun kolonialisme Belanda telah usai, namun dampak dari kebijakan yang rasialis masih bisa dirasakan. Kebanyakan orang Tionghoa di Indonesia cenderung tidak dekat terhadap agama Islam. Hal ini

disebabkan karena pelabelan terhadap Islam yang bersifat negatif yang diidentikan dengan penduduk pribumi. Faktor-faktor ini membuat orang Tionghoa yang memutuskan memeluk Islam merasa terasing terutama dari keluarga mereka. Tidak jarang dari mereka yang mendapatkan perlakuan diskriminasi dari keluarganya. Melihat kondisi tersebut, orang Tionghoa Muslim di Indonesia merupakan kelompok minoritas di tengah minoritas. Sebagai etnis Tionghoa mereka adalah minoritas di tengah mayoritas penduduk pribumi, sedangkan sebagai seorang Muslim mereka adalah minoritas di tengah etnis mereka yang umumnya non-Muslim (Afif, 2010).

Kondisi inilah yang mengilhami berdirinya organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), sebuah organisasi yang menaungi para mualaf Tionghoa, PITI juga menjadi wadah bagi agenda-agenda pembauran. Secara umum tujuan didirikannya PITI untuk menyatukan antara Muslim Tionghoa dan Muslim Indonesia, Muslim Tionghoa dengan etnis Tionghoa, dan etnis Tionghoa dengan penduduk pribumi. Lewat PITI, orang-orang Tionghoa yang memutuskan untuk memeluk agama Islam tidak lagi merasa terasing dan sendirian dengan identitas baru yang disandangnya, karena sesungguhnya mereka tidak sendirian dalam memakai identitas sebagai Tionghoa Muslim. Selain itu diharapkan mereka juga bisa lebih diterima oleh masyarakat pribumi yang mayoritas beragama Islam (Afif, 2010).

Organisasi yang didirikan pada 14 April 1961² ini merupakan fusi dari dua organisasi yang sudah ada sebelumnya, yaitu Persatuan Islam Tionghoa (PIT) yang saat itu dipimpin oleh Abdusomad Yap A Siong dan Persatuan Tionghoa Muslim (PTM) pimpinan Kho Goan Tjin. Saat itu, PIT dan PMT masih bersifat regional atau kedaerahan sehingga secara luas belum begitu dirasakan oleh umat Muslim Tionghoa di Indonesia. Munculnya PITI agaknya merupakan organisasi Tionghoa Muslim terbesar pertama di Indonesia. Lahirnya PITI pada saat itu merupakan buah dari nasihat mantan Ketua Umum Muhammadiyah, K.H. Ibrahim, beliau berpendapat bahwa dakwah Islam di kalangan etnis Tionghoa harus dijalankan oleh orang Tionghoa Muslim itu sendiri (Weng, 2019).

Gejolak politik pada tahun 1965 yang kemudian melahirkan kebijakan yang membatasi orang Tionghoa untuk berekspresi ternyata dirasakan pula oleh organisasi PITI. Pasca peristiwa G30S Pemerintah Orde Baru tengah menggalakkan gerakan *nation and character building* serta persatuan dan kesatuan bangsa. Imbasnya, simbol-simbol atau identitas yang sifatnya disosiatif atau menghambat persatuan, misalnya bahasa, istilah, dan budaya asing dilarang oleh Pemerintah. Dengan demikian PITI yang menggunakan kata Tionghoa di dalam nama organisasinya terpaksa dibubarkan lewat surat yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI tahun 1972. Untuk tetap menjaga dakwah di kalangan masyarakat Tionghoa, pada

² Terdapat perbedaan mengenai kapan didirikannya PITI. Di dalam buku autobiografi Abdul Karim Oey dijelaskan bahwa PITI didirikan pada tahun 1963. Sedangkan beberapa sumber lain menyebutkan berdirinya PITI terjadi pada 14 April 1961. Persoalan tersebut akhirnya dapat terpecahkan pada tahun 1985 setelah disepakati bahwa organisasi PITI berdiri pada 14 April 1961 (Tendean, 2010).

15 Desember 1972 pimpinan PITI mengambil keputusan dengan mengubah kepanjangan PITI menjadi Pembina Iman Tauhid Islam dengan tetap mempertahankan singkatan PITI.

Berbicara mengenai PITI tentu tidak bisa dipisahkan dari sosok H. Abdul Karim Oey. Seorang tokoh peranakan yang berjasa dalam kegiatan Islamisasi orang-orang Tionghoa di Indonesia. H. Abdul Karim Oey lahir di Padang pada 6 Juni 1905 dengan nama Oey Tjeng Hien. Beliau merupakan generasi kedua dari imigran asal Provinsi Fujian (Hokkian), Tiongkok Selatan yang bermigrasi ke Indonesia pada akhir abad ke-19. Oey tidak lahir dari keluarga Islam, konflik dalam dirinya lah yang membawanya untuk memeluk agama Islam. Keputusan Oey memeluk agama Islam disambut baik oleh kalangan Islam, bagaimana tidak, selama ini orang Tionghoa tidak dekat dengan agama Islam, terlebih Oey adalah tokoh yang dipandang di daerah Bintuhan.

Sebaliknya masyarakat Tionghoa di daerahnya terkejut mendengar Oey masuk Islam, tak jarang Oey sering mendapatkan perlakuan tidak mengenakan akibat konsekuensinya memeluk agama Islam. Hal ini kiranya dapat dipahami mengingat pandangan pada waktu itu bagi orang Tionghoa yang memeluk agama Islam akan dianggap sama seperti orang Melayu, yang di mata orang-orang Tionghoa merupakan masyarakat yang bodoh dan jorok. Cobaan yang dialaminya tersebut tidak menggoyahkan semangat Oey untuk terus mendalami agama Islam. Hingga akhirnya,

setelah dirasa cukup dalam menimba ilmu agama, Oey memutuskan menjadi seorang pendakwah.

Petualangannya sebagai seorang Muslim berlanjut, Oey diangkat menjadi ketua Muhammadiyah cabang Bintuhan sebelum akhirnya pada tahun 1939 menjadi Konsul Muhammadiyah untuk wilayah Bengkulu. Oey juga memiliki kedekatan dengan Bung Karno, terutama saat pengasingannya di Bengkulu. Selain bergerak di bidang perdagangan dan dakwah, Oey juga terjun ke dunia politik. Pada tahun 1946 Oey dipilih menjadi ketua umum Masyumi Bengkulu. Ketika agresi militer Belanda 1948 sedang bergejolak, Oey menjadi gerilyawan keluar masuk hutan demi berjuang melawan Belanda. Pada tahun 1952 Oey hijrah ke Jakarta. Di Jakarta inilah Oey mendirikan PITI, berawal dari keprihatinan Ketua Umum Muhammadiyah, H. Ibrahim, melihat dakwah Muhammadiyah tidak sampai kepada orang Tionghoa, padahal mereka sudah bergaul dengan penduduk pribumi, alhasil mereka lebih tertarik mengikuti zending³ dan misi nasrani. Berangkat dari pendapat beliau, akhirnya Oey bersama Yap A Siong (Abdul Somad) dan Kho Goan Tjin mendirikan PITI.

Lewat organisasi PITI, Oey turut memikirkan pemecahan masalah pembauran etnis Tionghoa di Indonesia dengan media dakwah. Selain itu latar belakangnya sebagai keturunan Tionghoa membuatnya terpanggil untuk menyiarkan agama Islam di kalangan etnisnya. Oey juga mengajak

³ Zending berasal dari bahasa Belanda yang berarti pengabaran Injil, yaitu usaha-usaha untuk menyebarkan agama Nasrani.

organisasi-organisasi Islam di Indonesia untuk bekerja sama dalam meningkatkan aktivitas dakwah di kalangan etnis Tionghoa. Oey selalu memberikan sokongan kepada pada mualaf Tionghoa untuk terus memperdalam ilmu agamanya agar kelak dapat menjadi pendakwah terutama kepada komunitas Tionghoa. Oey mengemban jabatan sebagai ketua umum PITI sampai tahun 1979. Untuk mengenang jasanya, para pengikutnya mendirikan Yayasan Karim Oey pada 9 April 1991.

Berdasarkan penjelasan di atas, Abdul Karim Oey bukan saja seorang pendakwah namun juga seorang nasionalis sejati. Menariknya sebagai seorang Muslim sekaligus pendakwah Oey tidak langsung berdakwah kepada masyarakat luas namun terlebih dahulu kepada keluarganya terutama ayahnya. Dalam organisasi PITI, Oey mengajak organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah guna meningkatkan aktivitas dakwah Islam. Melihat perjuangannya dalam berdakwah, peneliti merasa tertarik membahas perjalanan hidup terutama perannya dalam organisasi PITI. Sebagai pembandingan, peneliti membandingkan dengan penelitian sejenis seperti penelitian Muhamad Amien Fachry Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang berjudul "*Organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Pada Masa Orde Baru Tahun 1966-1972*" dan penelitian dari Nia Paramita Tendean mahasiswa Universitas Indonesia yang berjudul "*Pembina Iman Tauhid Indonesia (PITI) Sebagai Salah Satu Wadah Asimilasi Etnis Tionghoa di Indonesia 1972-1987*". Selain itu penulis juga membandingkan penelitian dari Selpi Gusria mahasiswa

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan judul “*Kiprah H. Abdul Karim Oey Dalam Bidang Sosial Keagamaan di Bintuhan Pada Tahun 1926-1938*”. Dua penelitian pertama membahas keberadaan PITI sebagai sarana asimilasi bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Kemudian penelitian terakhir yang disebutkan membahas peran H. Abdul Karim Oey di bidang sosial keagamaan di daerah Bintuhan. Sementara penelitian yang ingin peneliti lakukan lebih fokus pada peran H. Abdul Karim Oey di dalam organisasi PITI dari awal menjabat ketua umum sampai berhenti menjabat.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini membahas perjalanan hidup Abdul Karim Oey Tjeng Hien dalam memperjuangkan agama dan tanah airnya selanjutnya akan dibahas juga peran beliau dalam berdakwah di kalangan etnis Tionghoa lewat organisasi yang ia dirikan: Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI). Batas waktu yang ditetapkan adalah mulai dari tahun 1961 di mana Abdul Karim Oey mendirikan PITI sampai tahun 1974 pada saat beliau selaku ketua PITI mengajak Muhammadiyah untuk bekerja sama. Alasan lainnya mengapa peneliti memilih sampai tahun 1974 karena pada tahun tersebut kemampuan Abdul Karim Oey dalam mengurus PITI sudah sangat terbatas. Untuk menjawab permasalahan tersebut diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perjalanan hidup H. Abdul Karim Oey dari masa kecil di Padang sampai hijrahnya ke Jakarta?

2. Bagaimana latar belakang H. Abdul Karim Oey mendirikan PITI serta perannya dalam berdakwah di kalangan etnis Tionghoa lewat organisasi tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang sudah dijelaskan pada uraian sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan perjalanan hidup H. Abdul Karim Oey dari masa kecil di Padang sampai hijrahnya ke Jakarta.
- b. Untuk mendeskripsikan latar belakang H. Abdul Karim Oey mendirikan PITI dan perjuangan dakwahnya di kalangan etnis Tionghoa lewat organisasi tersebut.

1.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan memiliki kegunaan akademis dan praktis.

a. Kegunaan Akademis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan menambah wawasan tentang perjuangan H. Abdul Karim Oey dalam membela agama dan tanah airnya, terutama perannya sebagai pendakwah di kalangan etnis Tionghoa.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Kemudian untuk Program Studi Pendidikan Sejarah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mata kuliah Sejarah Intelektual dan menambah koleksi di Ruang Baca Sejarah terutama tentang tokoh Tionghoa di Indonesia. Selain itu untuk masyarakat luas hasil penelitian ini diharapkan mampu menghapus persepsi negatif etnis Tionghoa dimata sebagian masyarakat Indonesia maupun tentang Islam di kalangan etnis Tionghoa.

D. Metode Penelitian, Bahan Sumber, dan Sistematika Penulisan

1.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis atau sejarah. Metode penelitian sejarah merupakan penelitian yang dilakukan dengan meninjau suatu masalah dari sudut pandang sejarah berupa petunjuk khusus tentang bahan, kritik, interpretasi, dan penyajian sejarah (Kuntowijoyo, 2003). Penelitian historis mempunyai lima tahap, yaitu: pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan penulisan (Kuntowijoyo, 2013).

1) Pemilihan Topik

Pada tahap ini peneliti memilih mengangkat tema mengenai perjuangan seorang tokoh Tionghoa Muslim yaitu Abdul Karim Oey Tjeng Hien dalam berdakwah dikalangan masyarakat

Tionghoa. Alasan peneliti memilih tema tersebut selain tertarik dengan gerakan dakwah yang dilakukan oleh Abdul Karim Oey, peneliti juga tertarik dengan peran agama Islam sebagai sarana untuk mencapai pembauran etnis Tionghoa di Indonesia.

2) Pengumpulan Sumber (Heuristik)

Heuristik merupakan kegiatan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan yang digunakan untuk penelitian sejarah atau mencari sesuatu yang digunakan untuk menceritakan kembali penelitian sejarah (Kuntowijoyo, 2003). Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan seluruh sumber yang berkaitan dengan topik penelitian. Seperti mengumpulkan sumber-sumber yang terkait dengan Abdul Karim Oey serta sejarah keberadaan etnis Tionghoa terutama Tionghoa Muslim di Indonesia beserta permasalahannya, baik itu berupa buku, jurnal, koran, dan majalah. Sumber tersebut didapatkan melalui koleksi pribadi dan pencarian di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Selatan.

3) Kritik Sumber (Verifikasi)

Setelah mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan tema penelitian, langkah selanjutnya adalah menyeleksi atau menguji sumber-sumber tersebut. Tahap pengujian ini disebut dengan kritik atau verifikasi. Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan fakta yang akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan. Kritik sumber terbagi menjadi dua, yaitu kritik internal dan eksternal. Kritik internal dilakukan untuk menguji kredibilitas atau kebenaran sumber, apakah isi sumber yang didapat terpercaya atau tidak, sedangkan kritik eksternal dilakukan untuk menguji autentisitas atau keaslian sumber. Peneliti melakukan kritik internal dengan membandingkan dan memahami isi dari sumber yang sudah didapat semisal buku ataupun majalah sezaman seperti buku autobiografi Abdul Karim Oey dan majalah *Pandji Masjarakat* terbitan tahun 1972 yang didalamnya memuat pengakuan Abdul Karim Oey tentang faktor apa saja yang menghambat proses Islamisasi di kalangan orang-orang Tionghoa. Selanjutnya dalam melakukan kritik eksternal peneliti mencermati memoar yang ditulis Abdul Karim Oey yang disusun menjadi buku autobiografi, peneliti memperhatikan tanggal terbit buku tersebut. Selain buku peneliti juga memperhatikan tanggal terbit dan penerbit majalah yang menjelaskan tentang kehidupan Abdul Karim Oey semisal mencermati tanggal dan waktu terbit majalah *TEMPO* dan *Kiblat*.

4) Penafsiran (Interpretasi)

Tahap selanjutnya ialah menafsirkan atau menginterpretasikan sumber-sumber sejarah yang sebelumnya sudah diverifikasi guna menghasilkan cerita sejarah. Interpretasi dibedakan

menjadi dua macam yaitu analisis dan sintesis. Setelah sumber-sumber dikumpulkan, penulis akan menguraikan berdasarkan analisisnya untuk kemudian disatukan (sintesis) untuk menemukan fakta.

5) Penulisan (Historiografi)

Setelah peneliti melakukan proses pengumpulan sumber, verifikasi, dan menganalisis sumber-sumber yang diperoleh, maka langkah selanjutnya sekaligus langkah terakhir adalah mengungkapkannya dalam bentuk tulisan yang sistematis, logis, dan jelas serta memperhatikan struktur dan gaya bahasa penulisan. Hal ini dilakukan agar orang lain dapat memahami apa yang peneliti sampaikan. Penyajian penelitian dalam bentuk tulisan mempunyai tiga bagian: (1) Pengantar, (2) Hasil Penelitian, dan (3) Simpulan (Kuntowijoyo, 2003).

Dalam Skripsi ini disajikan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama: Pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang, batasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, sumber sejarah, dan sistematika penulisan.

Bab kedua: Perjalanan Hidup H. Abdul Karim Oey. Bab ini berisi Masa awal beliau di Kota Padang dan kehidupan perantauan di Bintuhan yang di dalamnya dijelaskan

perjalanannya memeluk agama Islam sampai menjadi aktivis Muhammadiyah Bintuhan. Dalam bab ini juga akan dijelaskan kiprah beliau dalam organisasi Muhammadiyah Bengkulu, perjuangannya saat perang kemerdekaan sampai kepindahannya ke Jakarta.

Bab ketiga: Peran Abdul Karim Oey dalam Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Tahun 1961-1974. Bab ini berisi latar belakang H. Abdul Karim Oey mendirikan PITI dan peran beliau dalam berdakwah di kalangan etnis Tionghoa lewat organisasi tersebut.

Bab keempat atau bab terakhir ini akan berisi kesimpulan. Sistematika penulisan ini dapat berubah, sesuai dengan penemuan yang terdapat di lapangan.

1.2 Bahan dan Sumber Penelitian

Sumber penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer didapat dari autobiografi Abdul Karim Oey: *Mengabdikan Agama, Nusa dan Bangsa: Sahabat Karib Bung Karno* dan hasil wawancara yang dimuat di majalah *Pandji Masyarakat* yang terbit pada 1972 serta wawancara dengan salah satu anak Abdul Karim Oey, yaitu Oey Tek Lie atau M. Ali Karim. Selain itu didapatkan juga arsip yang dimiliki oleh Yayasan Haji Karim OEI.

Sedangkan sumber sekunder didapat dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan juga koleksi pribadi.

Sumber sekunder terdiri dari buku yang ditulis oleh penulis lain mengenai Abdul Karim Oey dan organisasi PITI. Selain itu peneliti juga menggunakan sumber yang berhubungan dengan keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia secara umum dan komunitas Tionghoa Muslim secara khusus, seperti buku Leo Suryadinata: *Tokoh Tionghoa dan Identitas Nasional: Dari Tjoe Bou San Sampai Yap Thiam Hiem*; Siswono Yudo Husodo: *Warga Baru (Kasus Cina di Indonesia)*; beberapa buku Afthonul Afif: *Menjadi Indonesia: Pergulatan Identitas Tionghoa Muslim Indonesia dan Identitas Tionghoa Muslim Indonesia: pergulatan mencari jati diri*. Selain buku peneliti juga menggunakan majalah *TEMPO* terbitan 23 Agustus 1980 yang didalamnya membahas Abdul Karim Oey. Peneliti juga menemukan sumber lain berupa berupa jurnal dan skripsi yang berfokus pada etnis Tionghoa di Indonesia dan kehidupan Abdul Karim Oey.